

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG

Oleh:
Putri Oktaviani

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak mental dan psikologis korban secara jangka panjang. Di Provinsi Lampung, data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual yang signifikan, di mana pada semester I tahun 2025 tercatat 56,9% dari total kekerasan adalah kekerasan seksual dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Fenomena ini diperparah dengan adanya ancaman kekerasan yang membuat korban seringkali merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung? dan Apasaja faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang kompeten, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di Bandar Lampung telah berjalan secara terstruktur baik secara *in abstracto* maupun *in concreto*. Secara normatif (*in abstracto*), tahap formulasi regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan ancaman pidana berat sebagai wujud kebijakan kriminal negara. Dalam implementasi nyata (*in concreto*), penegakan hukum diwujudkan melalui kebijakan aplikasi oleh aparat kepolisian dan kejaksaan dalam tahap penyidikan dan penuntutan, serta kebijakan eksekusi melalui pelaksanaan putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Meskipun telah berjalan secara sistematis,

Putri Oktaviani

penegakan hukum tersebut masih menghadapi hambatan kompleks yang mencakup lima faktor utama, yakni faktor hukum terkait rumusan norma yang bersifat terlalu umum dan multitafsir, serta faktor aparat penegak hukum yang berkaitan dengan keterbatasan kompetensi khusus dalam penanganan trauma anak dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, terdapat kendala pada faktor sarana dan fasilitas berupa keterbatasan akses tenaga ahli forensik atau psikolog serta fasilitas ramah anak, faktor masyarakat yang cenderung menganggap kasus ini sebagai aib keluarga sehingga lebih memilih penyelesaian secara informal, serta faktor kebudayaan patriarki dan stigma victim blaming yang menghambat keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Di antara kelima faktor tersebut, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat diidentifikasi sebagai hambatan yang paling dominan dalam memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum di Bandar Lampung.

Saran penelitian ini adalah aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan kesamaan persepsi dalam menafsirkan unsur-unsur ancaman kekerasan guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, diperlukan penguatan literasi hukum dan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap korban agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung proses hukum. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan sarana rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan bagi anak korban untuk memulihkan dampak traumatis yang dialami.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemerksaan Anak, Ancaman Kekerasan.

ABSTRACT

LEGAL ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIME OF RAPE WITH THE THREAT OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN BANDAR LAMPUNG

By:
Putri Oktaviani

The crime of rape against children is a serious offense that causes not only physical harm but also long-term mental and psychological damage to the victims. In Lampung Province, data indicates a significant increase in sexual violence cases, where in the first semester of 2025, it was recorded that 56,9% of the total violence cases were sexual violence, with the majority of victims being girls. This phenomenon is exacerbated by the threat of violence, which often causes victims to fear reporting the incidents they have experienced. The primary problems in this research are: How is the law enforced against perpetrators of the crime of rape with the threat of violence against children in Bandar Lampung? and What are the inhibiting factors in the law enforcement of the crime of rape with the threat of violence against children in Bandar Lampung?

This research employs normative juridical and empirical juridical approach methods. Primary data were obtained through interviews with competent informants, namely Judges of the Tanjung Karang District Court, Public Prosecutors of the Bandar Lampung District Attorney's Office, Investigators from the Lampung Regional Police, and Lecturers of the Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Lampung. Secondary data were sourced from literature studies including laws and regulations, legal literature, and related official documents. The collected data were then processed and analyzed using qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion indicate that law enforcement against perpetrators of the crime of child rape in Bandar Lampung has been carried out structurally, both in abstracto (regulatory formulation stage) and in concreto (field application stage). Normatively (in abstracto), the regulatory formulation stage has provided a strong legal basis through the Child Protection Act, which establishes severe criminal penalties as a form of national criminal policy. In real implementation (in concreto), law enforcement is realized through application policies by the police and prosecutors during the investigation and prosecution stages, as well as execution policies through the implementation of court decisions to ensure legal certainty and protection for victims. Although it has proceeded systematically, law enforcement still faces complex obstacles encompassing five

Putri Oktaviani

main factors: the legal factor regarding norm formulations that are too general and ambiguous, and the law enforcement officer factor related to limited specialized competence in handling child trauma and high case loads. Additionally, there are constraints in the means and facilities factor such as limited access to forensic experts or psychologists and child-friendly facilities; the community factor, which tends to view these cases as a family disgrace, leading to a preference for informal settlements; and the cultural factor involving patriarchy and victim-blaming stigma, which hinders the victims' courage to report their experiences. Among these five factors, the law enforcement officer and community factors are identified as the most dominant obstacles affecting the effectiveness of the law enforcement process in Bandar Lampung.

The suggestions of this research are that law enforcement officers need to improve coordination and common perception in interpreting the elements of the threat of violence to ensure legal certainty. Furthermore, it is necessary to strengthen legal literacy and provide massive education to the community to eliminate negative stigmas against victims to create a social environment that supports the legal process. The government is also expected to optimize sustainable psychological rehabilitation facilities for child victims to recover from the traumatic impacts experienced.

Keywords: Law Enforcement, Child Rape, Threat of Violence.